

ABSTRAK

PEMBUNUHAN TERHADAP BEGAL DALAM PEMBELAAN DARURAT (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid. Sus- Anak/2020 /Pn Kpn)

Oleh : Ahmat Zamroni

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H.,C.N.,M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Absoril Fithry, S.H.,M.H

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain secara moril maupun materil .Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya

Adapun rumusan masalah penulisan dalam skripsi ini Bagaimana dasar pertimbangan perlindungan hukum bagi pembunuh begal dalam pembelaan darurat dan Bagaimana bentuk tanggung jawab pembunuh begal dalam pembelaan darurat .

Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara baik dengan alat maupun tanpa menggunakan peralatan tertentu. Peralatan apa saja bisa digunakan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan.Bentuk tanggungjawab pelaku pembunuhan terhadap begal yaitu seorang pelaku menerima sanksi pidana yang seharusnya dikenakan Pasal 351 tentang Penganiyaan yang dijerat hukuman penjara paling lama 7 Tahun penjara .

Kata kunci: *Tindak pidana, pembunuhan , begal*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF MURDER AGAINST BEGALS IN EMERGENCY DEFENSE (Case Study on Malang District Court Decision Number 1/Pid.Sus- Anak/2020/Pn Kpn)

By: Ahmat Zamroni

Main Advisor: Dr. Sjaifurrachman, S.H.,C.N.,M.H

Supervising Lecturer: Abshoril Fithry, S.H.,M.H

Law is a regulation that regulates the order of human life, both written and unwritten, which contains sanctions. Law in Indonesia is a mixture of the European legal system, religious law and customary law. Crime is an evil behavior or act that everyone can feel. These actions can harm others morally and materially. Murder is no longer a new thing in people's lives. So often the crime of murder occurs, so that people are no longer surprised to hear, see, and witness it.

As for the formulation of the problem in writing this thesis, how is the basic consideration of legal protection for criminal killers in an emergency defense and what is the form of responsibility for a criminal killer in an emergency defense.

So, begal is an act that is categorized as an act that violates the law, the crime of robbery or robbing or stealing on the road and accompanied by acts of violence committed by someone to the victim who is deprived of his property such as motorbikes and other property. Violent acts such as Murder is categorized as a negative reaction to legal problems and is considered a crime that should be threatened with criminal sanctions. However, acts of violence such as murder always occur in people's lives. Murder can be carried out in various ways, both with tools and without using certain equipment. Any equipment can be used by one person to kill another person.

Article 49 of the Criminal Code as a legal basis for legal protection for a person who conducts self-defense or forced defense. From article 49 of the Criminal Code, the criminal act of the perpetrator gets the reason for the abolition of the crime so that he is free from all charges. The form of responsibility of the perpetrator of the murder against the robber is that an offender receives a criminal sanction that should be subject to Article 351 concerning Persecution which is sentenced to a maximum prison sentence of 7 years in prison.

Keywords: *Crime, murder, robbery*